

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Pendidikan Kejuruan

Menurut Sukanto (2001) dalam Usman (2012:6) pendidikan kejuruan adalah semua jenis dan bentuk pengalaman belajar yang membantu anak didik meniti tahap-tahap perkembangan vokasionalnya, mulai dari identifikasi, eksplorasi, orientasi, persiapan, pemilihan dan pematapan karir di dunia kerja. Pendapat tersebut mengisyaratkan bahwa dunia pendidikan kejuruan sangat erat kaitannya dengan perkembangan karir lulusan setelah bekerja di dunia kerja dan industri (dudi). Lulusan harus bekerja sesuai dengan bidang keahliannya agar karirnya dapat berkembang dengan pesat.

Menurut Evans dalam Djojonegoro (1998:33) mendefinisikan bahwa pendidikan kejuruan adalah bagian dari sistem pendidikan yang mempersiapkan seseorang agar lebih mampu bekerja pada suatu kelompok pekerjaan atau satu bidang pekerjaan daripada bidang-bidang pekerjaan lainnya.

Menurut Sudira (2012:10) pendidikan kejuruan merupakan bagian program yang dirancang untuk menyiapkan individu untuk pekerjaan yang menguntungkan sebagai pekerja semi terampil atau trampil penuh atau teknisi atau bagian dari profesionalis yang

dibutuhkan dalam pekerjaan atau jabatan baik untuk menjabat baru atau jabatan/pekerjaan mendesak.

Sedangkan menurut Adhikari dalam Sudira (2012:13) pendidikan kejuruan adalah pendidikan yang dirancang untuk mengembangkan ketrampilan, kemampuan/kecakapan, pemahaman, sikap, kebiasaan-kebiasaan kerja, dan apresiasi yang dilakukan oleh pekerja dalam memasuki pekerjaan dan membuat kemajuan-kemajuan dalam pekerjaan penuh makna dan produktif.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pendidikan kejuruan merupakan pendidikan yang mempersiapkan orang untuk dapat mengembangkan vokasionalnya, kemampuan, sikapnya dan ketrampilannya dalam bekerja untuk dapat menunjangnya ketika akan memasuki dunia kerja.

Tujuan pendidikan kejuruan di Indonesia diatur dalam PP 19 tahun 2005 pasal 26 ayat 3 sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan dan dirubah kembali pada Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan sebagai pendidikan untuk meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta ketrampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai dengan bidang kejuruannya.

2. Pendidikan Menengah Kejuruan

. Pendidikan kejuruan/vokasi pada tingkat menengah difokuskan pada penyiapan individu awal memasuki dunia kerja. Pendidikan kejuruan/vokasi harus berorientasi pada kebutuhan komunitas (lokal, regional, nasional, internasional). Menurut Hadiwaratama (2005) dalam (Djarmiko, 2013:18) hakikat pendidikan yang bersifat kejuruan mengikuti proses: (1) pengalihan ilmu (*transfer of knowledge*) atau penimbaan ilmu (*acquisition of knowledge*) melalui pembelajaran teori; (2) pencernaan ilmu (*digestion of knowledge*) melalui tugas-tugas, pekerjaan rumah dan tutorial; (3) pembuktian ilmu (*validation of knowledge*) melalui percobaan-percobaan laboratorium secara empiris atau visual; (4) pengembangan keterampilan (*skill development*) melalui pekerjaan nyata di bengkel atau lapangan. Keempat proses ini harus berlangsung dalam proses belajar mengajar baik di sekolah maupun di industri.

Berdasar penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pendidikan kejuruan merupakan pendidikan yang spesial dimana peserta didik akan disiapkan untuk bekerja dengan cara menambah pengetahuan, ketrampilan, dan pengalaman bekerja secara efektif dan efisien baik untuk bekerja sendiri atau dalam grup kerja, serta kemampuan untuk selalu beradaptasi dan mengantisipasi terhadap perkembangan ilmu dan teknologi.

Secara khusus pengertian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) terdapat dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, SMK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.

Pada prinsipnya misi utama SMK adalah menyiapkan tenaga kerja tingkat menengah siap kerja. SMK memberikan bekal para siswanya dengan berbagai keahlian yang dibutuhkan di dunia kerja. Oleh karena itu, SMK memiliki berbagai bidang keahlian. Seperti disebutkan dalam Permendikbud Nomor 70 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan bahwa Bidang Keahlian pada SMK meliputi: Teknologi dan Rekayasa; Teknologi Informasi dan Komunikasi; Kesehatan; Agribisnis dan Agroteknologi; Perikanan dan Kelautan; Bisnis dan Manajemen; Pariwisata; Seni Rupa dan Kriya; dan Seni Pertunjukan.

Tujuan pendidikan menengah kejuruan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional terbagi

menjadi tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum pendidikan menengah kejuruan adalah: (a) meningkatkan keimanan dan ketakwaan peserta didik kepada Tuhan Yang Maha Esa; (b) mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi warga Negara yang berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, demokratis dan bertanggung jawab; (c) mengembangkan potensi peserta didik agar memiliki wawasan kebangsaan, memahami dan menghargai keanekaragaman budaya bangsa Indonesia; dan (d) mengembangkan potensi peserta didik agar memiliki kepedulian terhadap lingkungan hidup dengan secara aktif turut memelihara dan melestarikan lingkungan hidup, serta memanfaatkan sumber daya alam dengan efektif dan efisien.

Tujuan khusus pendidikan menengah kejuruan adalah sebagai berikut: (a) menyiapkan peserta didik agar menjadi manusia produktif, mampu bekerja mandiri, mengisi lowongan pekerjaan yang ada sebagai tenaga kerja tingkat menengah sesuai dengan kompetensi dalam program keahlian yang dipilihnya; (b) menyiapkan peserta didik agar mampu memilih karir, ulet dan gigih dalam berkompetensi, beradaptasi di lingkungan kerja dan mengembangkan sikap profesional dalam bidang keahlian yang diminatinya; (c) membekali peserta didik dengan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni agar mampu mengembangkan diri di kemudian hari baik secara mandiri maupun melalui jenjang pendidikan yang lebih tinggi; dan (d) membekali peserta didik dengan

kompetensi-kompetensi yang sesuai dengan program keahlian yang dipilih.

Prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam penyelenggaraan pendidikan SMK. Menurut Charles Prosser dalam Djojonegoro (1998: 38-39) prinsip-prinsip pendidikan kejuruan dikemukakan sebagai berikut:

- a. Pendidikan kejuruan akan efisien jika disediakan lingkungan belajar yang sesuai dengan (replika) lingkungan di tempat kelak mereka akan bekerja.
- b. Pendidikan kejuruan yang efektif hanya dapat diberikan jika tugas-tugas yang diberikan di dalam latihan memiliki kesamaan operasional dengan peralatan yang sama dan mesin yang sama dengan yang akan dipergunakan di dalam kerjanya kelak.
- c. Pendidikan kejuruan akan efektif jika latihan diberikan secara langsung dan spesifik di dalam pemikiran, perhatian, minat, dan intelegensi intrinsik seperti yang diperlukan dalam pekerjaan itu sendiri.
- d. Pendidikan kejuruan akan efektif jika dia dapat memampukan setiap individu memodali minatnya, pengetahuannya dan keterampilannya pada tingkat yang paling tinggi.
- e. Pendidikan kejuruan yang efektif untuk setiap profesi, jabatan atau pekerjaan hanya dapat diberikan kepada seseorang yang

memerlukannya, yang menginginkannya, dan yang dapat untung darinya.

- f. Latihan pendidikan kejuruan akan efektif jika pemberian latihan yang berupa pengalaman khusus dapat diberikan terwujud dalam kebiasaan-kebiasaan yang benar dalam melakukan dan berpikir secara berulang-ulang hingga diperoleh penguasaan yang tepat guna dipekerjaannya.
- g. Pendidikan kejuruan akan efektif jika gurunya cukup berpengalaman dan menera pendidikan kejuruan kemampuan dan keterampilannya dalam mengajar.
- h. Untuk setiap pekerjaan terdapat kompetensi minimal yang harus dimiliki oleh individu agar bisa menjabat pekerjaan itu. Jika pelatihan tidak diarahkan mencapai kompetensi minimal individu dan masyarakat akan rugi.
- i. Pendidikan kejuruan harus mengenal kondisi kerja dan harapan pasar.
- j. Proses pemantapan yang efektif tentang kebiasaan bagi setiap pelajar akan sangat tergantung dari proporsi sebagaimana latihan memberikan kesempatan untuk mengenal pekerjaan yang sesungguhnya, dan bukan hanya tiruan.
- k. Sumber data yang paling tepat untuk menata pendidikan kejuruan materi pelatihan pendidikan kejuruan tidak ada lain kecuali pengalaman yang erat kaitannya dengan pekerjaan.

- l. Untuk setiap jabatan terdapat bagian inti yang sangat penting dan ada bagian lain yang bisa cocok dengan pekerjaan lain atau jabatan lain.
- m. Pendidikan kejuruan akan dirasakan efisien sebagai penyiapan pelayanan bagi masyarakat untuk kebutuhan tertentu pada waktu tertentu.
- n. Pendidikan kejuruan akan bermanfaat secara sosial jika hubungan manusiawinya diperhatikan.
- o. Administrasi pendidikan kejuruan akan efisien jika bersifat lentur dibandingkan yang kaku.
- p. Walaupun untuk sesuatu jenis pendidikan kejuruan telah diupayakan agar biaya per unit itu diperkecil, namun jika sudah sampai batas minimal tetapi ternyata hasilnya tidak efektif sebaiknya penyelenggaraan pendidikan kejuruan dibatalkan.

3. Sekolah Rujukan

Dalam buku panduan panduan pembinaan dan pengembangan sekolah rujukan tingkat Sekolah Menengah Pertama yang dikeluarkan oleh Kemendikbud (2018:18)

“Sekolah rujukan didefinisikan sebagai sekolah yang dibina Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan pemerintah daerah untuk menjadi sekolah acuan bagi sekolah lain di sekitarnya dalam penerapan penjaminan mutu pendidikan secara mandiri, memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP), dan memiliki prestasi atau keunggulan baik dalam bidang akademik maupun non akademik”

Menurut Kemendikbud (2015:1) SMK Rujukan adalah SMK yang memiliki kinerja unggul, akses besar, dan efektif dalam mengelola institusi sebagai model, acuan, dan pemberdaya sekolah binaan yang dapat dijadikan rujukan bagi sekolah-sekolah menengah kejuruan di sekitarnya. Dalam Irniyah (2017) SMK Rujukan adalah SMK dengan kinerja yang unggul, akses luas dan efektif dalam hal pengelolaan institusi.

Berdasarkan beberapa pendapat diatas maka dapat disimpulkan bahwa SMK rujukan adalah model sekolah yang memiliki kinerja unggul dari setiap segi pengelolaan sekolah kemudian sekolah rujukan wajib mengimbaskan implementasi SNP dan keunggulannya pada sekolah lain.

Adanya SMK rujukan ini berdasarkan dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2015-2019 yang mana salah satu programnya menyatakan setiap Kabupaten/Kota memiliki minimal 1 Sekolah Menengah Rujukan/Model. Dalam mewujudkan rencana tersebut diperlukan sebuah pembinaan kepada SMK yang selanjutnya untuk ditetapkan dan dikembangkan menjadi SMK Rujukan.

Beberapa indikator utama sebagai sekolah rujukan adalah: (a) berakreditasi A, (b) memiliki ekosistem pendidikan yang kondusif, (c) mengembangkan budaya mutu, (d) melaksanakan program penumbuhan

karakter, (e) menjadi pusat keunggulan, dan (f) lokasinya yang strategis, mudah dijangkau, dan aman.

Tujuan sekolah rujukan yaitu untuk untuk mendorong upaya sekolah dalam memenuhi standar nasional pendidikan guna peningkatan dan pemerataan mutu pendidikan melalui kerjasama dan pengimbasan antara sekolah rujukan dengan sekolah-sekolah di sekitarnya. Secara lebih rinci tujuan dari sekolah rujukan menurut Kemendikbud (2016: 18-19) yaitu:

- 1) Mempercepat sekolah dalam memenuhi standar nasional pendidikan.
- 2) Mempertahankan mutu sekolah yang telah memenuhi standar nasional pendidikan.
- 3) Meningkatkan mutu pendidikan, baik dalam skala nasional, regional maupun internasional.
- 4) Mempercepat dan sekaligus meningkatkan pemerataan mutu pendidikan di wilayah NKRI.
- 5) Menjadikan sekolah yang mampu mengembangkan dan mengimplementasikan kerjasama dengan satuan pendidikan aliansinya.
- 6) Menumbuhkembangkan ekosistem pendidikan yang berdasarkan asas kegotongroyongan.
- 7) Menjadikan sekolah sebagai pusat keunggulan, yang didasarkan atas komponen-komponen standar nasional pendidikan.
- 8) Menjadikan sekolah yang mampu mengembangkan dan mengimplementasikan budaya mutu pendidikan termasuk budaya literasi sekolah.
- 9) Menjadikan sekolah yang mampu mengembangkan dan mengimplementasikan program pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan.
- 10) Menjadikan sekolah yang mampu mengembangkan dan mengimplementasikan penumbuhan karakter.
- 11) Menjadikan sekolah sebagai model yang baik dan dapat dirujuk oleh sekolah lain.
- 12) Sebagai pusat pembelajaran yang efektif dan mampu mengimbasikan kepada sekolah lainnya.

SMK yang mendapat predikat calon sekolah rujukan secara bertahap mendapat pelatihan sampai tercapai standar nasional pendidikan. Dengan mutu SMK rujukan yang baik, diharapkan dapat menular ke SMK di sekitarnya atau SMK aliansi. Kerjasama dan pengimbasan dari SMK rujukan ke SMK aliansi dapat mendorong peningkatan mutu sekolah aliansi agar mencapai standar nasional pendidikan sehingga mutu pendidikan dapat merata di setiap sekolah.

Dalam buku panduan sekolah rujukan yang dikeluarkan oleh Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama (2018: 18-19) dijelaskan juga mengenai kriteria ideal sekolah rujukan dimana minimal harus terdapat satu sekolah di setiap kabupaten/kota untuk dapat mewujudkan program pembinaan dan pengembangan sekolah rujukan. Kriteria ideal dari sekolah rujukan adalah sebagai berikut:

a. Akreditasi sekolah

Akreditasi ini ditentukan oleh Badan Akreditasi Nasional sekolah/Madrasah (BAN S/M) dengan kriteria akreditasi dari sekolah rujukan adalah A. Jika dalam suatu kabupaten/kota terdapat sekolah yang memiliki akreditasi A dan masih berlaku, maka sekolah rujukan di kabupaten/kota tersebut harus yang memiliki akreditasi A. Jika tidak terdapat sekolah dengan akreditasi A, maka dapat dipilih sekolah yang terbaik di kabupaten/kota tersebut dengan akreditasi lebih rendah dari A.

b. Lokasi sekolah

Pemilihan sekolah rujukan diprioritaskan sekolah terletak dilokasi yang strategis, mudah dan aman artinya letak sekolah mudah di jangkau baik menggunakan transportasi umum maupun pribadi oleh sekolah imbas serta berada dalam lingkungan yang bebas dari gangguan keamanan dan bebas dari ancaman bencana alam.

c. Pusat keunggulan

Sekolah rujukan diharapkan telah memiliki keunggulan atau memiliki potensi keunggulan dibandingkan sekolah lainnya di daerahnya. Keunggulan yang dimiliki sekolah rujukan dapat berbentuk keunggulan dibidang akademik maupun non akademik, misalnya inovasi proses pembelajaran, manajemen sekolah, iptek, seni, budaya, olahraga dan lain sebagainya

d. Komitmen sekolah dan pemerintah daerah

Sekolah dan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota harus memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu dan dan bersedia mengimbaskan ke sekolah lain di wilayahnya.

e. Pelaksanaan kurikulum 2013

Sekolah rujukan harus sudah melaksanakan kurikulum 2013 minimal sejak tahun 2017.

Kriteria yang ada di SMK Rujukan diantaranya: (1) Memiliki peserta didik > 1000 peserta didik; (2) Guru Produktif yang mempunyai sertifikat pendidik >75 yang memiliki kriteria mampu menguasai

landasan kependidikan, penguasaan materi pembelajaran sesuai keahlian, mampu menyusun program pembelajaran, melaksanakan unsur-unsur penunjang pembelajaran dan merancang dan mengevaluasi pembelajaran; (3) Lahan yang siap dikembangkan 5000 m²; (4) Jaringan kerjasama industri > 100 Industri; (5) Fasilitas sarana dasar yang baik seperti dalam peraturan menteri pendidikan nasional No.40 tahun 2008 terdapat ruang pembelajaran umum (ruang kelas, perpustakaan dan laboratorium), ruang penunjang (Ruang pimpinan, ruang guru dan ruang tata usaha), dan ruang pembelajaran khusus (ruang praktik 256 m²) Untuk menampung peserta didik, ruang penyimpanan dan instruktur 48 m dan ruang praktik kompetensi tiap keahlian; (6) Letak sekolah dilokasi strategis (jarak dengan rumah dekat, kondisi prasarana perhubungan seperti kondisi jalan dan lebar jalan, keterseediaan berbagai saran penghubung termasuk frekuensinya dan tingkat keamanan serta kenyamanan untuk melalui jalur tersebut dan (7) keterserapan peserta didik 20% magang kerja dan kuliah diluar negeri. Sehingga alumni dari institusi pendidikan dapat bersaing dalam hal kompetensi baik didalam negeri maupun diluar negeri (Irniyah 2017:12).

SMK rujukan ini nantinya akan menjadi sekolah induk (aliansi) bagi 3 atau 4 SMK sejenis yang skalanya lebih kecil yang lokasinya tidak berjauhan di suatu daerah (Irniyah, 2017). Dalam penyelenggaraan SMK rujukan tidak bisa dilakukan secara sembarangan. SMK rujukan

merupakan sekolah unggul yang setiap program disekolah harus dilaksanakan sesuai dengan standar nasional yang ada. Kegiatan yang harus dilakukan oleh sekolah rujukan berupa pengimbasan, gerakan literasi sekolah dan juga program penguatan pendidikan karakter. Terciptanya program ini bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan dari sekolah lain yang memiliki kualitas mutu pendidikan lebih rendah dari sekolah rujukan. Adanya pengimbasan merupakan komitmen dari SMK rujukan untuk dapat mengimbaskan keunggulan sekolahnya kepada sekolah lain. Sekolah yang diimbaskan bernama sekolah imbas atau sekolah aliansi. Sekolah aliansi merupakan sekolah kecil yang bersinergi dengan sekolah rujukan guna mempercepat laju peningkatan mutu pendidikan. Sekolah aliansi ini berada disatu daerah dengan sekolah rujukan. Setiap sekolah rujukan bisa memiliki 3-5 sekolah aliansi yang nantinya akan diimbaskan mengenai berbagai kegiatan yang telah dilakukan pada sekolah rujukan yang gunanya untuk menaikan mutu dari sekolah aliansi. Sekolah aliansi ini memiliki kriteria sebagai berikut:

- a. SMK dengan jumlah siswa berkisar 200-300 orang
- b. SMK yang berlokasi sekitar SMK rujukan (dalam satu wilayah provinsi)
- c. Memiliki program keahlian yang relevan dengan SMK rujukan
- d. Memiliki komitmen untuk berkembang bersama SMK rujukan

- e. Bersedia menyiapkan sumber daya sekolah untuk terlibat dalam berbagai aktivitas pengembangan sekolah bersama SMK Rujukan
- f. Berupaya meningkatkan sumber daya agar cukup untuk mengembangkan diri dan operasional sekolah.

4. Sekolah Model

Isitilah SMK rujukan sejalan dengan istilah sekolah model. Dalam jurnal Pengembangan SMK Model untuk masa depan dijelaskan bahwa bahwa SMK Model adalah SMK yang dikembangkan dari SMK yang menyelenggarakan fungsi tunggal yaitu menyiapkan peserta didik untuk memasuki lapangan kerja pada bidang tertentu menjadi SMK yang menyelenggarakan multi-fungsi (fungsi majemuk) atas dasar prinsip-prinsip kemanfaatan, keterpaduan program, integrasi sumber daya (manusia, uang, peralatan, bahan, dan sebagainya), *resource sharing*, dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi secara maksimal (Slamet, 2013).

SMK model ini dikembangkan karena kondisi SMK saat ini masih menunjukkan hal-hal berikut:

- a. Hanya menyelenggarakan fungsi tunggal yaitu menyiapkan siswanya untuk bekerja pada bidang tertentu sebagai karyawan
- b. Lemah dalam menyiapkan siswanya menjadi wirausahawan
- c. Lambat daya tanggapnya terhadap dinamika tuntutan pembangunan ekonomi
- d. Belum selaras dengan dunia kerja

- e. Belum ada jaminan siswanya memperoleh pekerjaan yang layak

Fungsi majemuk dari sekolah model ini dikembangkan agar menekan keselarasannya dengan kebutuhan masyarakat yang mencakup 13 fungsi majemuk seperti yang disebutkan oleh Slamet (2013) yaitu sebagai berikut.

- a. SMK model dapat berfungsi mengembangkan program-program unggulan mutu lulusannya yang dapat dirujuk oleh SMK-SMK lain di Indonesia. Program unggulan yang dimaksud adalah yang selaras dengan keanekaragaman kebutuhan pembangunan ekonomi dan kebutuhan masyarakat.
- b. SMK model dapat mendirikan unit-unit usaha disekolahnya yang produknya bisa berupa barang dan/atau jasa dan siswanya bekerja di unit usaha ini sebagai karyawan atas bimbingan gurunya.
- c. SMK dapat berfungsi sebagai teaching industry yaitu SMK bekerja sama dengan industri dengan menyediakan tempat bagi industri untuk memproduksi barang sesuai dengan yang diproduksi oleh industri bersangkutan
- d. SMK model dapat berfungsi sebagai mitra perusahaan dalam pelatihan kerja karyawan perusahaan
- e. SMK Model dapat berfungsi sebagai pusat pelatihan kerja bagi siapa saja yang membutuhkannya dan yang dapat untung darinya terutama para pencari kerja atau yang ingin meningkatkan ketrampilannya

- f. SMK Model dapat berfungsi sebagai *community colage* yang menyelenggarakan kursus-kursus pendek ketrampilan kejuruan/vokasi dan menyelenggarakan Diploma 2, Diploma 2, dan Diploma 3 sebagai transit untuk melanjutkan ke universitas (berfungsi sebagai *transfer education, career education, and continuing education*).
- g. SMK Model dapat berfungsi sebagai pusat pelatihan keirausahaan bagi siapa saja yang ingin memulai/belajar ulang/mengembangkan usahanya.
- h. SMK Model dapat berfungsi sebagai tempat pelatihan praktik bagi SMK-SMK lain, baik untuk guru-gurunya maupun siswa-siswanya.
- i. SMK Model dapat berfungsi sebagai pusat produksi (*production center*) khususnya produk-produk yang berbasis keunggulan lokal yang tidak dimiliki oleh daerah-daerah lain dan bahkan negara-negara lain
- j. SMK Model dapat berfungsi sebagai Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja dan Tempat Uji Kompetensi (TUK) sebagai kepanjangan tangan dari Badan Nasional sertifikasi Profesi (BNSP).
- k. SMK Model dapat berfungsi sebagai pusat informasi pasar kerja/bursa kerja khusus (BKK) yang diupayakan melalui kerja sama dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi setempat.

- l. SMK Model dapat berfungsi sebagai pusat pengembangan bahan-bahan pelatihan kerja berbasis kompetensi yang dibutuhkan oleh SMK-SMK dan pusat-pusat pelatihan kerja.
- m. SMK Model dapat berfungsi sebagai pusat penyiapan calon tenaga kerja internasional (TKI). Untuk itu SMK model dituntut untuk memiliki wawasan global terutama wawasan tentang tenaga kerja yang dibutuhkan oleh negara-negara lain serta persyaratan-persyaratan untuk memasukinya.

Sekolah model sedikit berbeda dari sekolah rujukan karena sekolah model merupakan sekolah yang dibina langsung oleh Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) seperti yang dijelaskan dalam Kemendikbud (2016:3):

“Sekolah model adalah sekolah yang ditetapkan dan dibina oleh Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) untuk menjadi sekolah acuan bagi sekolah lain di sekitarnya dalam penerapan penjaminan mutu pendidikan secara mandiri. Sekolah model menerapkan seluruh siklus penjaminan mutu pendidikan secara sistemik, holistik, dan berkelanjutan, sehingga budaya mutu tumbuh dan berkembang secara mandiri pada sekolah tersebut.”

Sekolah model tersebut dibina oleh LPMP untuk dapat memenuhi SNP dan juga dapat menerapkan penjaminan mutu pendidikan sekolah. Pendampingan tersebut dilakukan oleh LPMP hingga sekolah yang didampingi dapat melaksanakan penjaminan mutu pendidikan secara mandiri. Sekolah model tersebut akan menjadi sekolah percontohan bagi sekolah lain yang akan menerapkan penjaminan mutu pendidikan secara mandiri. Sekolah model juga memiliki tanggung jawab untuk

mengimbaskan praktik penjaminan mutu pendidikan kepada sekolah lain dimana sekolah yang diimbaskan tersebut disebut sekolah imbas.

Sekolah model memiliki kriteria yang harus dipenuhi agar bisa dijadikan sekolah model seperti yang disebutkan dalam Kemendikbud (2016: 3-4), antara lain:

- a. Sekolah belum memenuhi SNP
- b. Seluruh komponen sekolah bersedia dan berkomitmen untuk mengikuti seluruh rangkaian pelaksanaan pengembangan sekolah model
- c. Adanya dukungan dari pemerintah daerah

Calon yang akan dijadikan sekolah model ditentukan oleh pemerintah daerahnya untuk jenjang SMK/SMA yang menentukannya adalah pemerintah provinsi. Berikut adalah kriteria pengusulan calon sekolah model:

Tabel 1. Kriteria sekolah model

Indikator	Kriteria sekolah model			
	SD	SMP	SMA	SMK
Akreditasi	A/B dan belum memenuhi SNP			
Kurikulum	Mulai/sudah menerapkan kurikulum nasional			
Lokasi	16 sekolah per kabupaen/kota (tidak boleh berada dalam gugus/kluster yang sama)			
Jumlah rombel	Min. 12 rombel		Min 9 rombel	
Komite sekolah	Wajib			
Komite pemda	Wajib			

Pengusulan calon sekolah model tadi ditindaklanjuti oleh LPMP dimana nanti akan dilakukan proses verifikasi dan validasi. Proses tersebut bisa berupa pencocokan dokumen sekolah dengan data pokok pendidikan, survey petugas LPMP ke sekolah, *Focus Grup Discussion* dengan seluruh komponen dari calon sekolah untuk mengetahui komitmen dan kesungguhan mereka menjadi sekolah model. Hasil dari verifikasi dan validasi tersebut dilaporkan kepada pemerintah daerah dimana pemerintah daerah dapat mengusulkan daftar baru jika terdapat sekolah yang tidak dapat memenuhi proses verifikasi dan validasi yang kemudian akan ditindaklanjuti oleh LPMP kembali. Pemerintah daerah juga dapat mengusulkan sekolah model diluar kuota yang diberikan oleh LPMP dengan kesepakatan bahwa sekolah diluar kuota akan didukung dan dibiayai oleh pemerintah daerah sendiri dan dibina oleh fasilitator daerah.

Fokus kegiatan dari sekolah model adalah SPMI (Sistem Penjaminan Mutu Internal). Dalam Permendikud No 28 tahun 2016 pasal 3 ayat (1) tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah dijelaskan bahwa penjaminan mutu pendidikan terdiri dari 2 yaitu:

- a. SPMI-Disdasmen yang direncanakan, dilaks anakan, dikendalikan dan dikembangkan oleh setiap satuan pendidikan di jalur formal pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah

- b. SPME-Disdasmen yang direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan dan dikembangkan oleh Pemerintah dan Pemerintah daerah, BSNP, dan BAN S/M sesuai dengan peraturan perundangan.

Terdapat pelatihan SPMI untuk sekolah model yang melibatkan LPMP dan dibantu oleh fasilitator daerah. Pelatihan SPMI dirancang sefleksibel mungkin baik dari sisi materi maupun metode pelatihan sehingga dapat diikuti oleh semua peserta dari berbagai level. Oleh karena itu, ruang lingkup pelatihan tidak hanya tersampainya substansi yang harus diterima oleh peserta pelatihan namun juga termasuk keterampilan yang harus dimiliki oleh peserta setelah mengikuti pelatihan untuk menjalankan peran dan fungsi masing-masing dalam penerapan penjaminan mutu internal di sekolah.

Dalam Kemendikbud (2016:15) dijelaskan ruang lingkup pelatihan SPMI meliputi:

- a. Pemahaman tentang sistem penjaminan mutu pendidikan
- b. Pemahaman tentang penerapan penjaminan mutu internal sekolah
- c. Pendalaman tentang bagaimana menerapkan siklus penjaminan mutu internal mulai dari memetakan mutu, perencanaan peningkatan mutu, implementasi peningkatan mutu, monitoring dan evaluasi hingga penetapan standar baru serta strategi baru.
- d. Membentuk tim penjaminan mutu sekolah sebagai penanggung jawab aktivitas penjaminan mutu di sekolah

- e. Pendalaman bagaimana melakukan pengimbasan praktek penjaminan mutu internal kepada sekolah lain.

Selain diberi pelatihan, sekolah model juga didampingi oleh fasilitator dalam pelaksanaannya. Pendampingan ini bertujuan supaya seluruh komponen sekolah model dapat mengimplementasikan penjaminan mutu internal. Fasilitator mengunjungi sekolah model secara bergantian sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan bersama dengan sekolah model (Kemendikbud, 2016:18).

Salah satu fokus dari sekolah model yaitu sekolah dapat melaksanakan SPMI secara mandiri. SPMI di sekolah harus dilakukan oleh seluruh anggota sekolah yaitu kepala sekolah, guru, dan staf sekolah sesuai tugasnya masing-masing, siswa dan lainnya. Ada lima tahapan siklus yang harus dilaksanakan yaitu:

- a. Tahap pertama memetakan mutu sekolah melalui kegiatan evaluasi diri sekolah
- b. Tahap kedua adalah membuat perencanaan peningkatan sekolah termasuk manajemen, kurikulum, kegiatan ekstrakurikuler, sumberdaya manusia dan dukungan insfrastruktur.
- c. Tahap ketiga pelaksanaan program penjaminan mutu sekolah
- d. Tahap keempat adalah monitoring dan evaluasi
- e. Tahap kelima adalah penetapan standar baru dan penyusunan strategi baru

5. Program Pengimbasan

Pada dasarnya untuk setiap lembaga kependidikan mempunyai program/kegiatan yang harus dilaksanakan baik yang sudah ditentukan oleh pemerintah ataupun yang ditentukan oleh lembaga pendidikan itu sendiri. Program tersebut haruslah melalui proses perencanaan, pelaksanaan dan juga evaluasi agar dapat mengetahui bagaimana program tersebut ketika sudah selesai dilakukan.

Setiap sekolah rujukan memiliki kegiatan atau program yang harus dilakukan tidak hanya untuk sekolah itu sendiri tapi juga untuk sekolah lain. kegiatan yang harus dilakukan untuk sekolah lain yaitu pengimbasan, kegiatan tersebut tidak hanya dilaksanakan oleh jenjang sekolah menengah saja tetapi oleh semua jenjang yang sekolahnya masuk dalam kategori sekolah rujukan.

Menurut panduan sekolah rujukan yang dikeluarkan oleh Kemendikbud (2018:42) pengimbasan sekolah rujukan merupakan proses pentransferan pengetahuan dan/atau pengalaman praktis dan/atau pemberian asistensi dalam memenuhi, mempertahankan, dan memperkaya SNP serta mengembangkan keunggulan-keunggulan penyelenggaraan pendidikan oleh sekolah rujukan kepada sekolah imbas.

Sedangkan menurut Kemendikbud (2016:2) pola pengimbasan adalah meningkatkan mutu pendidikan sesuai dengan standar nasional

pendidikan serta menciptakan budaya mutu pendidikan di satuan pendidikan.

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa pengimbasan adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh sekolah rujukan yang mempunyai maksud untuk menghantarkan sekolah imbas/aliansi mencapai standar nasional Pendidikan, meningkatkan ekosistem yang ada disekolah, meningkatkan budaya mutu dan meningkatkan keunggulan sekolah.

Pengimbasan ini tidak hanya dilakukan oleh sekolah rujukan tetapi dilakukan juga oleh sekolah model. Hanya saja pengimbasan pada sekolah model dan sekolah rujukan memiliki perbedaan. Perbedaan terdapat pada materi yang diimbaskan, sekolah model hanya mengimbaskan SPMI (Sistem Penjaminan Mutu Internal) sedangkan untuk sekolah rujukan tidak hanya pada SPMI saja tetapi fasilitas fisik, sarana dan prasarana serta keunggulan sekolah yang juga dapat diimbaskan. Perbedaan ini didasari pada dana bantu yang diberikan kepada sekolah rujukan lebih besar yang gunanya untuk memaksimalkan fasilitas fisik sekolah seperti laboratorium, ruang kelas atau yang lainnya. Fasilitas fisik tersebut dimaksimalkan agar kelak jika sekolah imbas membutuhkan bisa digunakan untuk kepentingan bersama.

Setiap kegiatan di SMK Rujukan harus tersusun secara rapi dan memiliki manfaat untuk bidang kependidikan baik itu disekolahnya

sendiri ataupun kepada sekolah imbas.tujuan pengimbasan sekolah rujukan ke sekolah imbas adalah:

- a. memenuhi indikator standar nasional pendidikan (SNP)
- b. mengembangkan potensi sekolah melebihi SNP
- c. mengembangkan keunggulan-keunggulan lain sesuai dengan potensi sekolah

Dari 3 tujuan pengimbasan tersebut sudah dapat menjelaskan bahwa sekolah rujukan mempunyai peran penting kepada sekolah imbas dalam menunjang setiap aspek pendidikannya yaitu seperti peningkatan SNP yang ada pada sekolah imbas, mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki oleh sekolah imbas dan mengembangkan keunggulan sekolah imbas agar sekolah imbas dapat bersaing dengan sekolah lainnya dan dapat menjadi sekolah yang bermutu baik.

Selain hal tersebut pengimbasan juga memiliki tujuan untuk meningkatkan akreditasi sekolah imbas agar menjadi sekolah yang bermutu baik. Menurut Wibawa (2017:234) akreditasi adalah proses yang digunakan institusi berwenang dalam memberikan pengakuan formal bahwa suatu institusi punya kemampuan untuk melakukan kegiatan tertentu. Akreditasi merupakan sebuah pengakuan dari berbagai pihak untuk institusi yang diakreditasi.

Setiap kegiatan atau program sekolah memiliki sasaran. Sasaran dari pengimbasan sekolah rujukan adalah sekolah yang imbas masih masuk dalam kategori:

- a. Sekolah Standar Pelayanan Minimal (SPM)
- b. Sekolah potensial.
- c. Sekolah formal mandiri yang ingin meningkatkan potensi sekolahnya.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) menjelaskan bahwa sekolah dikategorikan menjadi tiga, yakni standar pelayanan minimal (SPM), sekolah formal standar atau sekolah potensial dan sekolah formal mandiri atau Sekolah Standar Nasional. Untuk pelaksanaannya sendiri sekolah rujukan dapat mengimbaskan sebanyak 4 atau 5 sekolah. Sama halnya dengan dengan sekolah rujukan tersebut sekolah model juga dapat mengimbaskan hingga lima sekolah imbas (Kemendikbud, 2016:9). Sekolah imbas ditentukan oleh LPMP dimana sekolah imbas pada jenjang SD, SMP dan SMA ditentukan berdasarkan jarak terdekat dan untuk jenjang SMK dapat dipertimbangkan pula berdasarkan paket kejuruan yang dimiliki. Berikut adalah kriteria sekolah imbas menurut kemendikbud (2016:9)

Tabel 2. Kriteria Sekolah Imbas

Indikator	Kriteria sekolah imbas			
	SD	SMP	SMA	SMK
Akreditasi	≤ B dan belum memenuhi SNP			
Kurikulum	Mulai/sudah menerapkan kurikulum nasional (diutamakan)			
Lokasi	Didalam gugus/kluster yang sama dengan sekolah model			
Komite sekolah	Wajib			
Komite pemda	Wajib			

Kemendikbud dalam buku Panduan Pembinaan Dan Pengembangan Sekolah Rujukan Tingkat Sekolah Menengah Pertama (2016:84) menjelaskan kategori sekolah tersebut dijadikan sasaran pengimbasan karena didasarkan pada tingkat pemenuhan SNP yang meliputi standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pembiayaan, standar pengelolaan, dan standar penilaian. SPM adalah sekolah yang masih banyak kekurangan untuk pemenuhan SNP sedangkan sekolah potensial adalah sekolah yang SNP nya terpenuhinya SNP kurang dari 85%.

Prinsip-prinsip dari pengimbasan

- 1) Kolegial, yaitu hubungan kesejawatan antara fasilitator dan penerima pengimbasan.
- 2) Terbuka, yaitu fasilitator menyampaikan semua pengetahuan dan pengalaman praktisnya dalam memenuhi, mempertahankan, dan memperkaya SNP serta mengembangkan keunggulan-keunggulan sekolah.
- 3) Profesional, yaitu fasilitator memiliki kompetensi (penguasaan mengenai materi pengimbasan) yang memadai dan memberikan pengimbasan dengan baik.
- 4) Berdasarkan kebutuhan, yaitu materi pengimbasan adalah materi yang relevan dengan kebutuhan.

- 5) Berkelanjutan, yaitu bahwa pengimbasan dilaksanakan secara terus-menerus hingga sasaran memenuhi SNP dan mengembangkan keunggulan-keunggulan.

Pengimbasan harus memiliki fasilitator dalam setiap pelaksanaannya. Fasilitator tersebut adalah kepala sekolah dan guru dari sekolah rujukan yang bersangkutan. Fasilitator tersebut bisa juga berasal dari sekolah lain dan pengawas serta dosen yang memenuhi kriteria. Kompetensi fasilitator tergantung dari keunggulan-keunggulan yang dimiliki oleh setiap sekolah. Setiap keunggulan menghendaki tersedianya sekurang-kurangnya 1 (satu) orang fasilitator dengan kriteria fasilitator sebagai berikut:

- 1) Memiliki pengetahuan yang banyak pada SNP dan/atau keunggulan-keunggulan yang diimbaskan
- 2) memiliki pengalaman empiris yang cukup dalam memenuhi, mempertahankan, dan memperkaya SNP dan/atau keunggulan-keunggulan yang diimbaskan;
- 3) mampu mengimbaskan pengetahuan dan pengalaman empirisnya dengan baik;
- 4) memiliki waktu yang cukup untuk melaksanakan pengimbasan; dan
- 5) diijinkan oleh atasan.

Pengimbasan memiliki metode dalam mengimbaskan setiap keunggulan dari sekolahnya dan para fasilitator harus dapat menguasai metode tersebut. Metode-metode tersebut juga dapat dikembangkan

oleh sekolah rujukan untuk dapat meningkatkan kualitas dari kegiatan pengimbasan.

1) *Open class*

Merupakan pembelajaran yang dilaksanakan oleh seorang guru (yang sebaiknya seorang fasilitator) di kelas untuk dilihat dan diamati oleh peserta pengimbasan untuk memperoleh pengetahuan praktis proses pembelajaran yang baik. Setelah peserta melakukan pengamatan, mereka diberi kesempatan untuk menanyakan dan/atau mengonfirmasi berbagai hal terkait dengan pembelajaran yang dilihat/diamati tersebut.

2) *Open school*

Sekolah mengundang peserta pengimbasan untuk melihat bagaimana berbagai kegiatan PPK, peningkatan kemampuan literasi, ekstrakurikuler, ekosistem sekolah, sarpras, dsb. dikelola. Setelah peserta melakukan pengamatan, mereka diberi kesempatan untuk menanyakan berbagai hal terkait dengan penyelenggaraan atau pengelolaan berbagai hal yang dilihat/diamati di sekolah tersebut.

3) *Workshop*

Pelatihan dengan peserta pengimbasan difasilitasi untuk memperoleh pengetahuan lalu bekerja secara individu maupun secara kelompok untuk menyelesaikan pekerjaan yang berkaitan dengan tugas yang sebenarnya untuk mendapatkan pengalaman.

4) *In-house training* (pendampingan)

Pelatihan yang dilaksanakan di sekolah imbas dengan fasilitator datang ke sekolah di mana peserta (guru) mengajar. Pelatihan meliputi teori dan praktik berdasarkan kebutuhan peserta.

5) *Mentoring*

Pembimbingan, pembinaan, dan pelatihan oleh seorang fasilitator (yang berpengalaman pada bidangnya) terhadap peserta pengimbasan. Mentoring dapat dilaksanakan baik di sekolah rujukan atau di sekolah imbas secara berkala dalam jangka waktu yang lama.

6) Lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Untuk pelaksanaan pengimbasan dilakukan sesuai dengan kesepakatan antara sekolah rujukan dengan sekolah imbas. Kesepakatan tersebut yaitu sekolah imbas dapat mencapai sekolah standar nasional. Untuk tempat pelaksanaan pengimbasan bisa dilaksanakan di sekolah imbas ataupun sekolah rujukan sesuai dengan kesepakatan bersama.

a. Perencanaan program pengimbasan

Setiap kegiatan dalam suatu lembaga pendidikan perlu direncanakan untuk dapat mengetahui alur program tersebut sehingga ketika program terlaksana tidak terdapat kendala yang berarti. Menurut S.P. Siagian dalam Wibawa (2017:142) perencanaan adalah keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang dari hal-hal yang akan dikerjakan di masa yang akan datang dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Perencanaan pendidikan berfungsi sebagai panduan dalam pelaksanaan pendidikan, pengendalian pendidikan, dan pengawasan dalam penyelenggaraan pendidikan. Perencanaan merupakan suatu proyeksi tentang kegiatan-kegiatan apa yang akan dilakukan dalam mencapai sasaran dan tujuan yang akan dicapai. Kegiatan perencanaan terdiri dari mengidentifikasi, menginventarisasi dan menyeleksi kebutuhan sesuai prioritas, mengadakan spesifikasi yang lebih rinci terhadap hasil yang akan dicapai, mengidentifikasi persyaratan yang dibutuhkan dalam memenuhi setiap kebutuhan, serta mengidentifikasi kemungkinan-kemungkinan/alternatif, strategi, dan sasaran (Somantri, 2014: 1-2). Sementara menurut Didin Kurniadin dan Imam Machali (2013:141) perencanaan pendidikan dapat diartikan sebagai sebuah proses yang sistematis dalam rangka mempersiapkan kegiatan kegiatan di masa yang akan datang dalam bidang pendidikan.

Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa perencanaan pendidikan merupakan suatu panduan yang disusun secara sistematis berisi program-program yang telah ditentukan sesuai dengan kebutuhan sekolah yang akan dilaksanakan dimasa yang akan datang. Tujuan dari perencanaan pendidikan yaitu agar setiap program yang telah ditentukan dapat berjalan dengan baik dan efisien

Menurut Aedi (2016: 182) dalam perencanaan pendidikan harus memiliki 3 kriteria penting yaitu :

- 1) *Feasibility* (perencanaan pendidikan harus dapat dilaksanakan)
- 2) *Consideration tes* (perencanaan pendidikan ada kesejajaran dengan sistem pendidikan dan secara eksternal harus ada kesejajaran dengan perencanaan ekonomi dan sosialnya).
- 3) *Optimum allocation of resources* (adanya perbandingan antara biaya yang ideal dengan tujuan yang akan dicapai)

Perencanaan pendidikan menurut Didin Kurniadin dan Imam Machali (2013: 141) ada beberapa persoalan yang dibahas dalam perencanaan pendidikan yaitu (1) tujuan, (2) posisi sistem pendidikan, (3) alternatif kebijakan dan prioritas untuk mencapai tujuan, (4) strategi. Selain itu perencanaan pendidikan pada tingkat makro tentu melalui tahapan perencanaan strategis guna menghasilkan rencana yang dapat dilaksanakan sebagai solusi yang muncul dari berbagai masalah dalam hasil analisis lingkungan internal dan eksternal pendidikan. Pada tingkat mikro perencanaan pendidikan dapat dikembangkan dengan mekanisme pengembangan Rencana Pengembangan Sekolah (RPS) pada pendidikan formal (Aedi, 2016: 182).

Rencana kerja sekolah merupakan hal yang harus ada dalam satuan pendidikan dan itu sudah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia RI Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan disebutkan bahwa setiap satuan atau lembaga pendidikan wajib menyusun rencana kerja

sekolah. Rencana kerja sekolah merupakan rencana strategis sekolah yang disusun sebagai acuan pengembangan program dimasa yang akan datang (empat atau lima tahun kedepan) dalam mencapai tujuan pendidikan. Rencana kerja sekolah mencakup kegiatan atau program dalam pemenuhan standar nasional pendidikan. Rencana kerja sekolah disusun sebagai acuan atau pedoman kerja dalam pelaksanaan pendidikan di sekolah. Rencana kerja sekolah terdiri dari RKS (Rencana Kerja Sekolah) dan RKAS (Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah). Program pengimbasan masuk dalam RKS jangka pendek yaitu 1 tahunan.

Menurut Kemendibud (2015: 3) RKS dan RKAS sangat penting bagi sekolah untuk:

- 1) Dijadikan dasar bagi sekolah dalam melaksanakan program-program sesuai dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran sekolah;
- 2) Penentuan prioritas sekolah untuk membuat target yang akan dicapai sebagai dalam jangka pendek, menengah, dan jangka panjang;
- 3) Penentuan langkah-langkah strategis dari kondisi nyata sekolah yang ada sekarang menuju kondisi sekolah yang diharapkan;
- 4) Pelaksanaan supervisi, monitoring, dan evaluasi keterlaksanaan program dan hasil-hasilnya dalam kerangka memperoleh umpan balik untuk memperbaiki RKS selanjutnya;
- 5) Dijadikan dasar oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Propinsi, dan Pusat untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi keterlaksanaan program dan hasil-hasilnya dalam kerangka melakukan pembinaan kepada sekolah;
- 6) Untuk memberikan masukan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Propinsi, dan Pusat dalam kerangka pencapaian standar nasional pendidikan;
- 7) Untuk memberikan gambaran kepada stakeholder sekolah (khususnya kepada orang tua siswa/masyarakat)

terhadap segala bentuk program sekolah yang akan diselenggarakan, baik dalam jangka pendek, menengah maupun jangka panjang.

Imron (2013) menjelaskan dalam Rencana Kerja Sekolah harus menggambarkan secara jelas tentang:

- 1) Visi sekolah yang menunjukkan gambaran sekolah di masa mendatang (jangka panjang) yang diinginkan.
- 2) Misi sekolah yang merupakan tindakan/upaya untuk mewujudkan visi sekolah yang telah ditetapkan sebelumnya.
- 3) Tujuan pengembangan sekolah merupakan apa yang ingin dicapai dalam upaya pengembangan sekolah pada kurun waktu menengah, misalnya untuk 3-6 tahun.
- 4) Tantangan, yaitu kesenjangan (*gap*) dari tujuan yang diinginkan dan kondisi sekolah saat ini. Tantangan itulah yang harus diatasi oleh sekolah.
- 5) Sasaran pengembangan sekolah, yaitu apa yang diinginkan sekolah untuk jangka pendek, misalnya untuk satu tahun.
- 6) Identifikasi fungsi-fungsi yang berperan penting dalam mencapai sasaran.
- 7) Analisis SWOT terhadap fungsi-fungsi tersebut, sehingga ditemukan kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), peluang (*oportunity*) dan ancaman (*threat*) dan setiap fungsi yang telah diidentifikasi sebelumnya.
- 8) Identifikasi alternatif langkah untuk mengatasi kelemahan dan ancaman dengan memanfaatkan kekuatan dan peluang yang dimiliki sekolah.
- 9) Rencana dan program sekolah yang dikembangkan dari alternatif yang terpilih guna mencapai sasaran yang ditetapkan.

Penyusunan RKS harus memuat isi diatas mulai dari penetapan visi dan misi sekolah sampai proses penyusunan RKS itu sendiri. Setelah semua langkah menuju RKS selesai dilakukan dan memberikan gambaran yang jelas tentang kondisi riil dan kebutuhan yang ingin dikembangkan, maka disusunlah RKS terdiri dari RKJM

(Rencana Kerja Jangka Menengah) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang disusun atas dasar skala prioritas.

Penentuan rencana tersebut juga menentukan durasi dan waktu pengimbasan yang ditentukan oleh kesepakatan dari kedua belah pihak yaitu sekolah imbas dan sekolah rujukan yang umumnya jika program pengimbasan memiliki durasi waktu yang panjang maka hasil pengimbasan tersebut akan semakin baik. Penentuan untuk menetapkan durasi pengimbasan dipertimbangkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhi yaitu:

- 1) tujuan yang hendak dicapai,
- 2) jumlah dana yang tersedia,
- 3) jarak dan waktu tempuh tempat pengimbasan, dan
- 4) metode pengimbasan.

Penentuan tempat untuk pengimbasan diatur oleh kedua pihak yaitu sekolah rujukan dan sekolah imbas yang nantinya juga dipengaruhi oleh metode pengimbasan yang akan diterapkan. Jika metode yang diterapkan *open class*, *open school*, dan magang, maka tempat pengimbasan adalah di sekolah rujukan. Jika metodenya *mentoring* dan *in-house training*, tempatnya pelaksanaannya di sekolah imbas. Penggunaan 2 (dua) metode pengimbasan atau lebih bertujuan untuk pengimbasan yang lebih baik di sekolah imbas dan isi dari materi dari pengimbasan dapat disampaikan dengan baik ke sekolah imbas juga.

Berdasarkan buku panduan pembinaan sekolah rujukan dijelaskan bahwa persiapan program pengimbasan ada 8 (delapan) poin yaitu:

- 1) pengidentifikasian keunggulan-keunggulan yang dimiliki yang layak diimbaskan,
- 2) penetapan fasilitator, fasilitator ini bisa kepala sekolah, guru ataupun dari LPMP dengan syarat :
 - a) memiliki pengetahuan yang banyak mengenai SNP dan/atau keunggulan-keunggulan yang akan diimbaskan
 - b) memiliki pengalaman empiris yang cukup dalam memenuhi, mempertahankan, dan memperkaya SNP dan/atau keunggulan-keunggulan yang diimbaskan
 - c) mampu mengimbaskan pengetahuan dan pengalaman empirisnya dengan baik;
 - d) memiliki waktu yang cukup untuk melaksanakan pengimbasan; dan
 - e) diijinkan oleh atasan.

Fasilitator ini memiliki tugas untuk melakukan serangkaian kegiatan pengembangan sekolah model dan pengimbasannya pada daerah masing-masing. Pemerintah daerah melalui dinas pendidikan dapat memberikan rekomendasi calon fasilitator daerah. Calon fasilitator daerah akan mengikuti tahapan seleksi

untuk menjamin fasilitator daerah yang berperan dalam pelaksanaan memiliki kapasitas yang kompeten dan terstandar.

- 3) pemilihan metode dan penyusunan skenario pengimbasan,
- 4) perumusan tujuan dan penyusunan bahan dan LK,
- 5) penetapan tempat pengimbasan, penetapan tempat tergantung pada metode yang akan digunakan bisa dilaksanakan di sekolah rujukan atau disekolah imbas
- 6) penyusunan jadwal (*action plan*) pengimbasan,
- 7) sosialisasi kegiatan pengimbasan kepada calon sasaran, dan
- 8) rekrutmen peserta.

Untuk sekolah model sebelum adanya program pengimbasan terdapat pelatihan yang dilaksanakan oleh pihak LPMP dan fasilitator daerah. Pihak LPMP mengadakan workshop mengenai Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). Workshop SPMI ini dilaksanakan agar sekolah model dapat menerapkan penjaminan mutu secara mandiri sehingga dapat menjadi model bagi sekolah lain yang akan menerapkan SPMI. Pengimbasan merupakan salah satu kegiatan yang harus dilakukan oleh sekolah model. Pelaksanaan pengimbasan minimal dilakukan 1 kali. Untuk waktu pelaksanaan pengimbasan dilakukan sesuai dengan kesepakatan bersama antar sekolah model dengan sekolah imbas.

b. Pelaksanaan program pengimbasan

Pada tahap pelaksanaan program pengimbasan ini fasilitator memfasilitasi peserta untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang mampu menjadikannya memenuhi, mempertahankan, dan memperkaya SNP serta mengembangkan keunggulan-keunggulan sekolah. Fasilitasi dilakukan melalui pelibatan peserta dalam serangkaian aktivitas pengimbasan dengan bahan dan/atau media yang telah dirancang. Fasilitasi tersebut dapat berlangsung baik di sekolah rujukan (pengimbas) dan/atau di sekolah imbas.

Program pengimbasan yang dikembangkan untuk sekolah imbas berupa:

- 1) Sosialisasi potensi sekolah rujukan/model kepada sekolah lain (imbas), sosialisasi ini untuk dapat memberikan informasi kepada sekolah imbas mengenai potensi-potensi yang dimiliki sekolah rujukan yang dapat diimbaskan ke sekolah imbas. Dengan adanya sosialisasi ini juga dapat membuat sekolah yang ingin diimbaskan mengembangkan potensi yang sama seperti sekolah rujukan.
- 2) Pembentukan tim pengimbasan
- 3) Pengembangan dan penyusunan materi pengimbasan dalam berbagai bentuk/cara beserta strategi pengimbasannya. Dimana materi pengimbasan mencakup 8 Standar Nasional Pendidikan termasuk K-13, ekosistem pendidikan yang kondusif, budaya

mutu, penguatan pendidikan karakter, keunggulan-keunggulan sekolah, manajemen berbasis sekolah, literasi sekolah, UNBK, media pembelajaran dan lainnya sesuai potensi sekolah rujukan dan kebutuhan dari sekolah imbas.

- 4) Implementasi dan pengembangan manajemen berbasis sekolah (MBS) ke sekolah imbas.
- 5) Penyebaran inovasi pembelajaran berbasis TIK dan/atau lainnya melalui berbagai media/sarana. Kegiatan ini bisa berupa pembelajaran *e-learning* kemudian memberdayakan sumber belajar yang variatif misal rumah belajar kemendikbud, *e-library*, *e-book*, dll. Selain hal tersebut bisa juga mengimplementasikan pendekatan dan metode berbasis saintifik dan lainnya untuk semua mata pelajaran.
- 6) Peningkatan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan. Kegiatan ini bisa berupa peningkatan kompetensi kepala sekolah seperti kompetensi *managerial*, *leadership*, pelatihan kepramukaan dan juga pelaksanaan program kemitraan. Peningkatan kompetensi guru dengan mengikutkan dalam diklat, guru harus lulusan S1, mengajar 24jam/minggu dan memiliki kemampuan TIK. Selain hal tersebut guru juga perlu meningkatkan kompetensi pedagogik.
- 7) Peningkatan kompetensi peserta didik. Peningkatan ini seperti mengadakan kegiatan membaca selama 15 menit sebelum

memulai pelajaran, mengembangkan interaksi antar peserta didik, guru dan warga sekolah. Untuk meningkatkan kompetensi peserta didik bisa dengan mengadakan lomba akademik dan non akademik, unjuk prestasi peserta didik, meningkatkan budaya kompetitif disekolah seperti lomba karya tulis ilmiah, debat, lomba keagamaan dll. Peningkatan budaya kolaboratif dengan mengadakan organisasi-organisasi intra sekolah, pengembangan kelompok belajar, penyelenggaraan tutor sebaya, pelibatan antar warga sekolah dalam kegiatan-kegiatan peserta didik dan penanaman kegotongroyongan.

- 8) Pembudayaan karakter, program yang bisa dilaksanakan berupa penumbuhan kesadaran moral dan spiritual dalam perilaku sehari-hari dengan cara membiasakan berdoa bersama ketika memulai pelajaran pembiasaan menunaikan ibadah bersama dan lain-lain. Program untuk menumbuhkan nilai-nilai kebangsaan seperti melakukan upacara bendera, menyanyikan lagu kebangsaan dan juga menyanyikan lagu daerah. Pembudayaan karakter sendiri mempunyai alur yaitu diajarkan, dibiasakan, dilatih konsisten, menjadi kebiasaan, menjadi karakter dan terakhir menjadi budaya.
- 9) Peningkatan kompetensi tenaga pustakawan dan laboran. Peningkatan ini berupa peningkatan kompetensi dari tenaga pustakawan dan laboran yang bisa mengikuti diklat sehingga

memperoleh sertifikat diklat yang akan meningkatkan kompetensinya dalam bekerja.

10) Pengembangan jejaring kerjasama untuk mencapai tujuan bersama.

Kegiatan ini bisa dengan melibatkan dunia industri dalam pendidikan yaitu dengan meningkatkan kualitas kompetensi dan merelevansi kompetensi yang ada di dunia industri dengan kompetensi yang ada di sekolah. Kegiatan ini akan sangat mengembangkan kompetensi dari peserta didik dan juga dapat mempermudah dari lulusan yang akan bekerja di dunia industri kelak.

11) Pemanfaatan fasilitas bersama antara sekolah rujukan dengan sekolah imbas dan masyarakat. Sekolah rujukan dapat meminjamkan sarana dan prasarana untuk sekolah imbas dengan tujuan agar pembelajaran di sekolah imbas bisa memenuhi sesuai kompetensi yang telah ditentukan. Sekolah rujukan bisa meminjamkan media pembelajaran, laboratoriumnya, ruang kelas dan lain-lain dengan tujuan peningkatan kompetensi di sekolah imbas. Contoh halnya jika pada jurusan kendaraan ringan, sekolah imbas yang belum memiliki sarana prasarana yang memadai dalam pelaksanaan pembelajarannya maka sekolah imbas dapat menggunakan laboratorium milik jurusan kendaraan ringan di sekolah rujukan dengan persetujuan sekolah

rujukan terlebih dahulu. Sama halnya dengan pengimbasan kepada masyarakat dimana ketika pelaksanaan program tersebut masyarakat bisa menggunakan fasilitas sekolah dalam meningkatkan kompetensinya dibidang yang dipilih. Kegiatan yang dilakukan kepada masyarakat berupa diklat.

- 12) Penerapan SPMI. Penerapan SPMI ini sudah dilaksanakan oleh sekolah rujukan/sekolah model. Kegiatan pengimbasan SPMI ini dilakukan untuk dapat memberikan informasi kepada sekolah imbas mengenai tatacara atau alaur dalam pelaksanaan SPMI dan diharapkan sekolah imbas mampu melaksanakan SPMI secara mandiri. Pada materi SPMI ini sekolah model/rujukan mendapatkan pendampingan dari LPMP terlebih dahulu agar ketika mengimbankan kesekolah imbas sudah matang dan tidak terdapat kendala apapun. Kegiatan tersebut dibantu juga oleh Fasilitator daerah yang telah dipilihkan oleh LPMP
- 13) Memaksimalkan keunggulan sekolah. Sekolah rujukan/model memiliki program unggulan. Program tersebut dapat diimbaskan kesekolah imbas dengan tujuan agar sekolah imbas mengetahui program yang diunggulkan sekolah dan dapat mengetahui potensi-potensi sekolah yang dapat dijadikan program unggulan
- 14) Pengimbasan kurikulum 2013 kepada sekolah imbas dimana kegiatan dilakukan dengan cara intruktur kabupaten yang dipilih oleh LPMP melakukan pendampingan kesekolah sasaran dengan

tujuan untuk mengetahui dan mendampingi guru yang masih belum mengetahui atau belum menerapkan kurikulum 2013 didalam pembelajarannya..

Program pengimbasan tersebut tidak terpaku hanya mengimbaskan 8 SNP saja tetapi bisa mengimbaskan keunggulan-keunggulan dari sekolah rujukan ke sekolah imbas sesuai dengan kebutuhan dari sekolah imbas sendiri. Hal tersebut juga sudah disebutkan dalam sasaran pengimbasan dimana sekolah yang sudah memenuhi 8 SNP bisa juga dilakukan program pengimbasan dengan persetujuan dari sekolah tersebut untuk mengembangkan keunggulan sekolah yang dimiliki agar sama seperti sekolah rujukannya. Dimana nantinya sekolah rujukan bisa saja mengimbaskan semua indikator dari sekolah rujukan ke sekolah imbas agar sekolah imbas tersebut bisa menjadi sekolah rujukan.

Untuk langkah-langkah dari pengimbasan sendiri sudah dijelaskan dalam Panduan Pembinaan Dan Pengembangan Sekolah Rujukan Tingkat Sekolah Menengah Pertama sekolah rujukan yang dikeluarkan oleh Kemendikbud (2016:74):

- 1) Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota melakukan verifikasi bersama LPMP
- 2) Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota menetapkan sekolah imbas (sejumlah sekolah secara proporsional dan bertahap, minimal 5 sekolah di sekitarnya)

- 3) LPMP melaksanakan fasilitasi kepada tim yang dibentuk oleh sekolah rujukan sebagai tim inti pelaksana pengimbasan;
- 4) tim inti melakukan pengimbasan;
- 5) sekolah imbas magang di sekolah rujukan;
- 6) LPMP dan pengawas pembina Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota melaksanakan pendampingan dan evaluasi dalam rangka peningkatan mutu.

c. Monitoring dan Evaluasi program pengimbasan

Setiap program yang telah dilaksanakan oleh suatu lembaga pendidikan maka perlu dilakukan monitoring dan evaluasi. Pada program pengimbasan monitoring dan evaluasi merupakan tahap ketiga yang harus dilakukan.

Monitoring adalah suatu proses terus menerus dalam pengumpulan dan analisis data untuk mengkomparasikan antara suatu program, kebijakan, atau kegiatan yang sedang dilaksanakan dengan hasil yang diharapkan. Monitoring dapat dikatakan sebagai proses rutin pengumpulan data dan pengukuran kemajuan atas program atau memantau perubahan yang fokus pada proses dan keluaran.

Menurut buku panduan sekolah rujukan yang dikeluarkan oleh kemendikbud (2018:46) dijelaskan bahwa monitoring atau pemantauan adalah pengamatan rutin dan pencatatan kegiatan yang sedang berlangsung pada suatu proyek atau program. Pemantauan

program melibatkan pengumpulan informasi (data) secara teratur untuk mengukur kemajuan (atau tidak adanya kemajuan) dalam mencapai tujuan program yang dimonitor dan dievaluasi. Pemantauan memungkinkan pengelola program dan pemangku kepentingan untuk membuat keputusan mengenai efektivitas program dan penggunaan sumber daya yang efektif dan efisien.

Sedangkan evaluasi adalah proses menilai. Hal ini dapat berlaku untuk desain program atau prestasi program terutama dalam kaitannya dengan kegiatan yang direncanakan dan tujuan secara keseluruhan. Evaluasi biasanya melibatkan penggunaan dan kadang-kadang pengumpulan informasi untuk menentukan bahwa program dan kegiatannya telah mencapai tujuan atau tidak mencapai tujuan yang diharapkan.

Evaluasi mendeskripsikan suatu analisis objektif terhadap kebijakan, program, atau project yang sedang berjalan atau telah selesai dilaksanakan untuk menentukan relevansinya, efektivitasnya, efisiensinya, dampak dan sustainabilitasnya, berdasar pada informasi yang reliabel dan kredibel.

Evaluasi sering dikaitkan dengan penilaian. Menurut Aedi (2015:206) penilaian didefinisikan sebagai kegiatan sistematis untuk mengumpulkan, mengolah, menganalisis, mendeskripsikan dan menyajikan data atau informasi yang diperlukan sebagai masukan untuk pengambilan keputusan.

Dari beberapa pengertian evaluasi diatas dapat diketahui bahwa evaluasi program pendidikan merupakan proses pengumpulan dan menyajikan informasi dari suatu program atau kegiatan yang sudah berjalan untuk menentukan alternatif keputusan. Keputusan alternatif tersebut sesuai dengan kepentingan dari evaluatur yang akan menentukan apakah program pendidikan tersebut dapat dilanjutkan atau tidak.

Menurut Didin Kurniadin dan Imam Machali (2013: 376) menyebutkan bahwa fungsi evaluasi antara lain:

- 1) Untuk memperoleh dasar bagi pertimbangan suatu periode kerja, apa yang telah dicapai, apa yang belum dicapai, dan apa yang perlu mendapat perhatian khusus
- 2) Untuk menjamin cara kerja yang efektif dan efisien yang membawa organisasi pendidikan (manusia/tenaga, sarana/prasarana, biaya) secara efisien dan ekonomis
- 3) Untuk memperoleh fakta tentang kesulitan, hambatan, dan penyimpangan dilihat dari aspek tertentu misalnya program tahunan dan kemajuan belajar.

Menurut Depdiknas (2009: 21) dalam penyusunan evaluasi program sekolah perlu memperhatikan prinsip-prinsip yang ada, antara lain:

- 1) Kegiatan evaluasi program sekolah dikembangkan atas dasar hasil evaluasi pada tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa evaluasi harus dilaksanakan secara berkesinambungan. Dalam hal ini diterapkan prinsip peningkatan mutu berkelanjutan (*continous quality improvement*).
- 2) Kegiatan evaluasi program sekolah mengacu pada kebijakan pendidikan baik itu kebijakan pendidikan yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) di tingkat pusat ataupun Dinas Pendidikan setempat (kabupaten/kota).

- 3) Sasaran prioritas ditetapkan atas dasar persoalan/masalah yang dihadapi oleh setiap sekolah binaan. Keragaman persoalan yang dihadapi akan membedakan sasaran prioritas evaluasi pada setiap sekolah.
- 4) Evaluasi program sekolah selalu diawali dengan penilaian kondisi awal sekolah berkaitan dengan rencana pengembangan sekolah, sumber daya pendidikan, dan program kerja sekolah. Pada tahap selanjutnya dilakukan penilaian serta pembinaan berdasarkan hasil evaluasi.
- 5) Pelaksanaan evaluasi bersifat fleksibel namun tidak keluar dari ketentuan tentang penilaian, pembinaan, dan pemantauan sekolah. Pengawas sekolah memiliki wewenang dalam menetapkan, metode kerja, langkah-langkah, dan indikator keberhasilan program sekolah dengan memperhatikan kondisi obyektif sekolah yang bersangkutan.

Sedangkan menurut Arikunto (2013: 108) secara garis besar evaluasi program dibagi menjadi beberapa tahapan yaitu:

1) Persiapan evaluasi program

Persiapan terdiri dari penyusunan evaluasi, penyusunan instrumen evaluasi, validasi instrumen evaluasi, jumlah sampel, penyamaan persepsi. Penyusunan evaluasi terkait model yang akan digunakan dalam proses evaluasi. Pemilihan model tergantung dengan tujuan evaluasi. Metode pengumpulan, alat pengumpul data, sasaran evaluasi, dan jadwal evaluasi yang akan digunakan untuk menjadi acuan dalam pelaksanaan evaluasi program.

2) Pelaksanaan evaluasi program

Evaluasi program dapat dikategorikan menjadi 4 jenis yaitu evaluasi reflektif, evaluasi rencana, evaluasi proses, dan evaluasi

hasil. Jenis evaluasi yang dipilih berguna untuk menentukan metode dan alat pengumpul data evaluasi. Pelaksanaan evaluasi sesuai dengan hasil persiapan evaluasi program.

3) Monitoring pelaksanaan evaluasi

Monitoring pelaksanaan evaluasi memiliki dua fungsi yaitu untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan program evaluasi dengan rencana evaluasi dan untuk mengetahui seberapa pelaksanaan program evaluasi dapat menghasilkan perubahan yang diinginkan (tujuan evaluasi). Fungsi yang kedua yaitu mengenali sejak dini peluang tercapainya tujuan evaluasi.

Evaluasi tidak hanya dilakukan oleh penyelenggara pengimbasan yaitu sekolah rujukan saja tetapi evaluasi ini dilaksanakan oleh LPMP. Monev yang dilaksanakan oleh LPMP hanya sebatas mengambil sampel dari sekolah rujukan yang sudah melaksanakan pengimbasan. Poin yang diperhatikan berupa keterlaksanaan pengimbasan dan juga konten meteri yang diperoleh dari sekolah rujukan kepada sekolah imbas.

Monitoring dan evaluasi dalam buku Panduan Pembinaan Dan Pengembangan Sekolah Rujukan Tingkat Sekolah Menengah (2018:47) dijelaskan seperti berikut:

- 1) Tujuan monitoring dan evaluasi
 - a) Memantau kemajuan pelaksanaan pengimbasan
 - b) Mengetahui tingkat keberhasilan kegiatan pengimbasan

- c) Mengidentifikasi *lesson learned* (kendala, solusi, dan *good practice*) pelaksanaan pengimbasan
- 2) Aspek monitoring dan evaluasi
- a) Kesesuaian antara rancangan dan pelaksanaan kegiatan pengimbasan dalam hal waktu pelaksanaan, tempat pelaksanaan, fasilitator, sasaran, cakupan materi, mekanisme/skenario, dan *output* (ketercapaian tujuan);
 - b) Kendala/masalah yang dihadapi serta penyelesaian yang telah dan/atau akan dilaksanakan;
 - c) Hal-hal yang mempermudah/mendukung terlaksananya pengimbasan;
 - d) *Lesson learned*.
- 3) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi

Kegiatan monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh Direktorat Pembinaan sekolah menengah, yang terdiri dari unsur pejabat, staf, tim ahli, dan tim teknis Direktorat Pembinaan sekolah menengah; dan Unsur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kota sebagai bagian dari monitoring dan evaluasi Sekolah Rujukan.

- 4) Waktu pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi

Kegiatan monitoring dan evaluasi oleh Direktorat Pembinaan dilaksanakan pada saat kegiatan-kegiatan Sekolah Rujukan sedang dilaksanakan.

5) Pelaporan

Panitia pelaksana pengimbasan membuat laporan pelaksanaan kegiatan pengimbasan yang diserahkan kepada penanggungjawab Sekolah Rujukan. Laporan mencakup laporan pelaksanaan kegiatan dan laporan keuangan dibuat selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah kegiatan pengimbasan berakhir. Laporan dilampiri foto-foto dan dokumen-dokumen pelaksanaan kegiatan pengimbasan secukupnya, misalnya:

- a) Undangan
- b) Daftar hadir
- c) Materi
- d) Produk kegiatan

B. Penelitian yang Relevan

Dari beberapa penelitian yang terkait dengan dengan judul penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti mengenai kemitraan adalah sebagai berikut:

1. Hasil penelitian yang relevan dengan penelitian ini yaitu penelitian dari Yunida Cahya Kinanti dengan judul “Kemitraan Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Di Sma Negeri 2 Yogyakarta”. Penelitian yang dilakukan oleh Yunida Cahya Kinanti hampir sama dengan peneliti yaitu meneliti tentang kerja sama dari satu sekolah dengan sekolah yang lain untuk mencapai tujuan bersama. Variabelnya ada kesamaan yaitu mengenai faktor penghambat dan pendukung. Namun terdapat sedikit perbedaan yaitu jika pada Yunida Cahya Kinanti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, instrumen penelitian menggunakan wawancara dan dokumentasi saja sedangkan peneliti menggunakan metode deskriptif kuantitatif yaitu instrumen ditambah dengan angket yang nanti akan diperkuat dari hasil wawancara dan dokumentasi.
2. Hasil penelitian yang relevan dengan penelitian ini yaitu penelitian dari Enggar Dista Pratama dengan judul “Pelaksanaan Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) Di Smk Negeri 2 Pengasih”. Penelitian yang dilakukan oleh Enggar Dista Pratama memiliki banyak kesamaan yaitu pada variabelnya tentang perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program kemudian dari metode yang digunakan yaitu deskripsi kuantitatif dan

juga instrumen yang digunakan yaitu wawancara, dokumentasi serta angket. Namun terdapat sedikit perbedaan yaitu pada angket peneliti menggunakan skala Guttman sedangkan Enggar Dista Pratama menggunakan skala Linkert. Kemudian perbedaan terdapat dari program yang diteliti yaitu enggar Dista Pratama meneliti tentang Penguatan Pendidikan Karakter sedangkan peneliti meneliti tentang Pengimbasan sekolah.

3. Kajian penelitian yang relevan selanjutnya yaitu dari Nining Mariyaningsih. Penelitian ini berjudul Evaluasi Program Pengembangan SMK Rujukan Di SMK Negeri 2 Salatiga dengan hasil penelitian menunjukkan: (1) pada evaluasi Context, adanya kesenjangan mutu antar SMK di Salatiga telah memicu kebutuhan akan program pengembangan SMK Rujukan, (2) Pada Evaluasi Input, Desain Program terbukti mampu menjawab kebutuhan akan perlunya suatu program yang menjembatani kesenjangan antar SMK di Salatiga, (3) Pada aspek Process, Program SMK Rujukan telah berjalan sesuai dengan juknis hanya saja pada aspek pendampingan kepada SMK Aliansi kurang maksimal, (4) Pada aspek Product, SMK Negeri 2 Salatiga telah memiliki 3 SMK Aliansi dan telah berhasil mengantarkan 2 SMK Aliansi mengajukan diri menjadi SMK Rujukan tahun 2016. Adapun faktor pendukung program antara lain: kerjasama tim yang bagus, adanya komitmen bersama untuk mensukseskan program, keterbukaan anggaran dan memiliki potensi lahan, peralatan, guru dan siswa.

Sedangkan faktor penghambat meliputi: perbedaan persepsi antara SMK Rujukan dan SMK aliansi dan minimnya dana yang dialokasikan untuk kerjasama dengan SMK Aliansi. Berdasarkan hasil penelitian direkomendasikan supaya program terus dilanjutkan dengan perbaikan dan dukungan dana untuk SMK Aliansi.

C. Kerangka Pikir

Pada era sekarang ini pendidikan menengah kejuruan merupakan salah satu pendidikan yang dianggap menjadi pemasok tenaga kerja di dunia industri. Dunia industri pun banyak bekerja sama dengan sekolah menengah kejuruan untuk dapat mempermudah dalam mencari tenaga kerja yang relevan dengan kompetensi yang sudah ditentukan oleh dunia kerja.

Sekolah rujukan merupakan sekolah dengan terpenuhinya standar nasional pendidikan yang baik akan tetapi di Indonesia masih banyak sekali sekolah yang belum dapat memenuhi standar nasional pendidikan yang telah ditentukan oleh peraturan perundangan sehingga bisa disebut bahwa mutu pendidikan di Indonesia masih rendah karena masih banyak sekolah yang belum memenuhi standar pendidikan yang ada.

Sekolah rujukan mempunyai program pengimbasan yaitu program yang gunanya untuk membantu sekolah imbas agar bisa memenuhi standar nasional yang telah ditentukan ditambah dengan peningkatan potensi sekolah, peningkatan ekosistem sekolah agar lebih kondusif dalam proses pengajaran dan peningkatan mutu sekolah. Sekolah imbas merupakan sekolah dengan pemenuhan standar nasional pendidikan yang masih kurang

cukup atau bisa dikategorikan sekolah standar pelayanan minimal dan sekolah potensial dengan pemenuhan standar nasional pendidikan yang masih kurang dari 85%.

Program pengimbasan terdiri dari beberapa tahapan yang harus dilaksanakan. Tahapan tersebut mencakup (1) perencanaan program pengimbasan (2) pelaksanaan program pengimbasan (3) evaluasi program pengimbasan. Tahapan tersebut harus dilakukan untuk mengetahui bagaimana program pengimbasan dari sekolah rujukan kepada sekolah imbas apakah berjalan dengan baik atau tidak

1. Perencanaan program pengimbasan

Perencanaan merupakan dasar dari program pengimbasan dimana perencanaan ini akan menentukan metode pengimbasan yang akan dilakukan, perumusan tujuan pengimbasan, penentuan tempat pengimbasan, penyusunan jadwal, rekrutmen sekolah imbas, penetapan fasilitator, dan juga menentukan keunggulan-keunggulan yang layak untuk diimbaskan.

2. Pelaksanaan Program pengimbasan

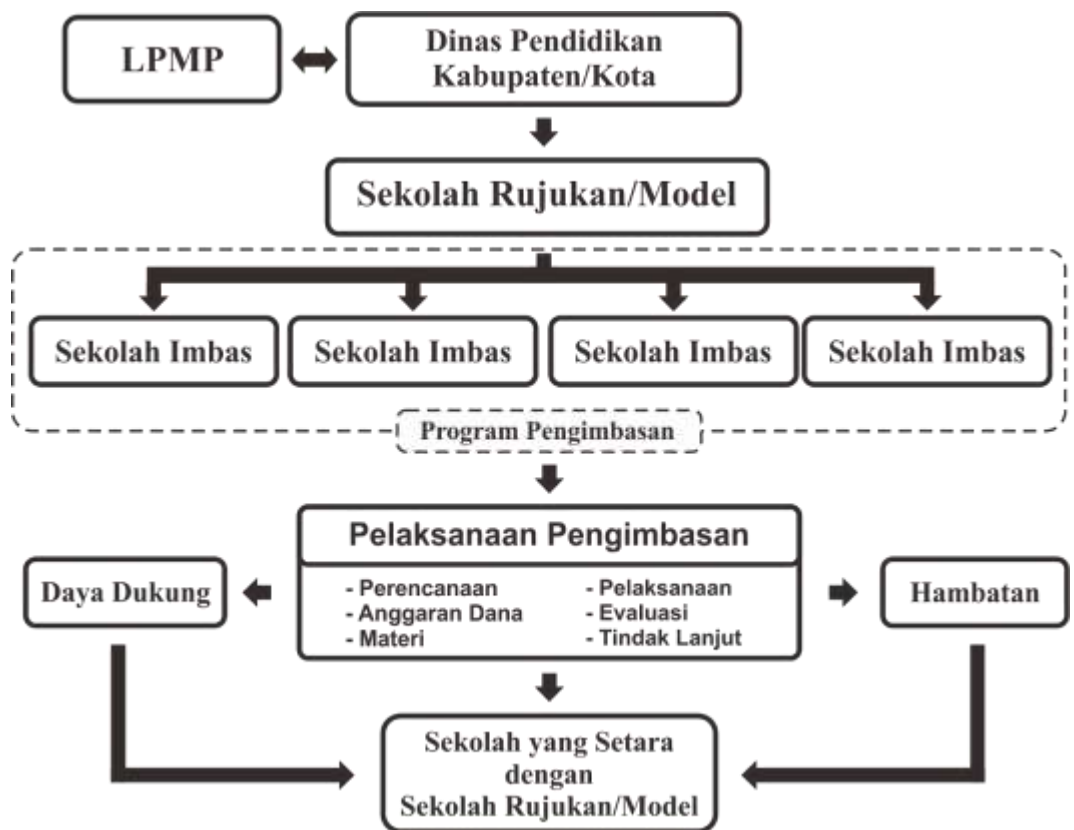
Pada pelaksanaan program pengimbasan ini setiap program yang sudah direncanakan sebelumnya dan sudah disetujui kedua belah pihak dilaksanakan. Untuk langkah-langkahnya yaitu (1) Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota melakukan verifikasi bersama LPMP, (2) Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota menetapkan sekolah imbas, (3) LPMP melaksanakan fasilitasi kepada tim yang dibentuk oleh sekolah rujukan

sebagai tim inti pelaksanaan, (4) tim inti melakukan pengimbasan, (5) sekolah imbas magang di sekolah rujukan, (5) LPMP dan pengawas pembina Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota melaksanakan pendampingan dan evaluasi dalam rangka peningkatan mutu

3. Monitoring dan evaluasi program pengimbasan

Kegiatan monitoring dan evaluasi merupakan kegiatan yang dilakukan pada tahap akhir setiap program yang telah dilaksanakan. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tingkat keberhasilan program yang telah dilaksanakan tersebut. Setiap monitoring dan evaluasi terdapat tindak lanjut untuk program yang telah dilaksanakan.

Kerangka pikir dalam penelitian ini untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan pengimbasan dari SMK rujukan yaitu SMK Negeri 2 Pengasih kepada sekolah-sekolah imbas dan mengetahui faktor-faktor yang dapat mempengaruhi program pengimbasan tersebut. Berikut adalah skema kerangka pikir.



Gambar 2. Kerangka Pikir

D. Pertanyaan penelitian

Berdasarkan dari kajian teori, kerangka pikir dan rumusan masalah yang telah dijelaskan di atas, maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut.

1. Bagaimana perencanaan program pengimbasan di SMK N 2 Pengasih?
 - a. Apakah terdapat tim khusus dalam pelaksanaan program pengimbasan?
 - b. Bagaimana pengelolaan anggaran untuk program pengimbasan?
2. Bagaimana pelaksanaan program pengimbasan di SMK N 2 Pengasih?
 - a. Apakah terdapat pedoman pelaksanaan program pengimbasan?
 - b. Kapan pelaksanaan program pengimbasan?
 - c. Siapa yang bertanggung jawab atas keterlaksanaan program pengimbasan?
3. Bagaimana evaluasi penyelenggaraan program pengimbasan oleh SMK?
 - a. Kapan pelaksanaan evaluasi program pengimbasan?
 - b. Siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan evaluasi program pengimbasan?
 - c. Bagaimana tindak lanjut dari hasil evaluasi pelaksanaan program pengimbasan?
4. Apa saja faktor penghambat dan pendorong untuk melaksanakan pengimbasan di SMK N 2 Pengasih?

5. Apa saja upaya untuk mengatasi faktor penghambat program pengimbasan di SMK N 2 Pengasih?